



RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

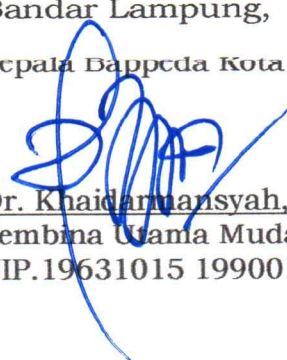
TAHUN 2024

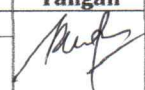
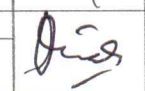
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	√			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	√			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√			
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	√			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
5	BAB V	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Juli 2023
Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung,


Dr. Khaidar Mansyah, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP.19631015 199001 1 002

Diverifikasi : Juli 2023		Tanda Tangan
1	ARI RODIANSYAH Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2	Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si. Perencana Ahli Madya	

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG


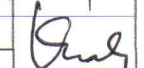
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

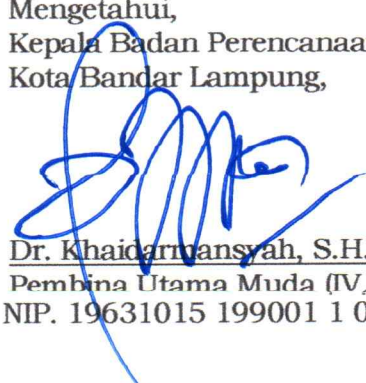
Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Plt.Dinas kesehatan Kota Bandar Lampung,


Desti Mega Putri, S.P., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691202 199503 2 002

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	ARI RODIANSYAH, ST Kepala Bidang Pemerintahan Dan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Perencana Ahli Madya	


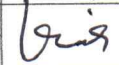
Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandar Lampung,


Dr. Khaidarmansyah, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631015 199001 1 002

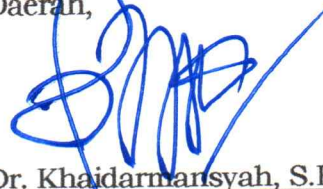
FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	Telah sesuai dengan RKPD Tahun 2024
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah sesuai dengan RKPD Tahun 2024

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	ARI RODIANSYAH, ST	
	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
	Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



Dr. Khaidarmansyah, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Tahun 2024 telah selesai disusun. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini, mengacu kepada Perencanaan Startegis, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini maka program dan kegiatan yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 belum sempurna dalam penyajiannya. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Desti Mega Putri, SP., MT

Pembina TK I/ IV b

NIP. 196912021995032002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	I_1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra	II-1
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	II-12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	II-42
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal OPD	II-42
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-9
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

**LAMPIRAN 2
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala

kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-1 (satu) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu ***Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat***. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyusun Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
20. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selama tahun 2021, serta perkiraan target tahun 2024. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Untuk capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**TABEL 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung TA 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	Penurunan AKI	5/100.000 kelahiran hidup	3/100.000 kelahiran hidup
		Penurunan AKB	5/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	9,00%	4.09 (hasil Operasi timbang)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	18,00%	6,65 (hasil Operasi timbang)
2	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	317/100.000 penduduk	207/100.000 penduduk
		Persentase orang dengan HIV	0,227%	0,21
		Persentase penemuan penyakit tidak menular (Diabetes Melitus)	60%	56%
3	Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	20%	18,90
		Persentase Puskesmas di Kota Bandar Lampung yang tersertifikasi, terakreditasi nasional	100%	100%
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis	100%	100%
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah rumah tangga ber- PHBS	85%	70%

Dari tabel 2.1 tersebut dapat dijelaskan untuk capaian sasaran 1 Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan 4 (empat) indikator kinerja, menunjukkan hasil lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung telah mampu menekan kejadian ataupun kasus baik kematian ibu, kematian bayi, gizi kurang (underweight) pada balita dan kasus stunting pada bayi usia dibawah 2 tahun stunting.

Pencapaian sasaran 2 yaitu Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Dari 4 indikator kinerja tersebut 3 (tiga) indikator yaitu Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Persentase orang dengan HIV dan Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) capaian indikator dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa prevelensi/kejadian penyakit di Kota Bandar Lampung untuk ketiga jenis indikator tersebut mampu ditekan sehingga jumlah kasus di bawah target. Sedangkan untuk indikator Persentase penemuan penyakit tidak menular (Diabetes Melitus) masih jauh dibawah target, hal ini dikarenakan situasi pandemi covid 19 yang membatasi kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya penjangkaran/penemuan penderita DM. Kegiatan pemeriksaan yang biasa dilakukan pada tempat-tempat umum dan pusat keramaian melalui Posbindu *mobile*, dimasa pandemi tahun 2021 tidak dilakukan.

Sasaran 3 (tiga) yaitu Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan 2 (dua) indikator telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 4 (empat) yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dengan indikator capaian Jumlah Rumah Tangga Ber- PHBS masih di bawah target yang ditetapkan (70% dari target 85%). Hasil capaian ini menunjukkan masih ada rumah tangga yang belum melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dari beberapa indikator dalam PHBS ini sebagian besar dari anggota rumah tangga yang merokok.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rencana PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
										Target Releja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6n+8+10	(12) = ((11/5) x 100)		
1	01	2.06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			
1	01	2.06	02	01	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			
1	01	2.06	03	01	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			
1	01	2.06	04	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rasio	persen	100,00%	100	100	100	100,00%			
1	01	2.06	05	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			
1	01	2.06	06	01	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			
1	01	2.06	08	01	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	persen	100,00%	100	100	100	100,00%			
1	01	2.06	09	01	Penyenggaraan Rapat Kredensial dan Konsultasi SIPD	TABEL Perencanaan Pelaksanaan Dinas Kabalar	persen	100,00%	100	100	100	100,00%			
1	01	2.07	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	persen	98,00%	0	0	0	98,00%			
1	01	2.07	05	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor	paket	1 Paket	0	0	0	1 Paket			
1	01	2.07	06	01	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlatan Kantor	paket	1 Paket				1 Paket			
1	01	2.07	09	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	gedung	1 Gedung				1 Gedung			
1	01	2.07	10	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	paket	1 Paket				1 Paket			
1	01	2.07	11	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	paket	1 Paket				1 Paket			
1	01	2.08	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	persen		100	100	100				
1	01	2.08	02	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia	bulan	12 Bulan	12	12	100	12 Bulan			
1	01	2.08	04	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang Tersedia	bulan	12 Bulan	12	10	83	12 Bulan			
1	01	2.09	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen		100	100	100				
1	01	2.09	01	01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Terpelihara	unit		1	1	100				
1	01	2.09	02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang Terpelihara	unit		12	12	100				
1	01	2.09	06	01	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang Terpelihara	unit		1	1	100				
1	01	2.09	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang Terpelihara	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			
1	01	2.09	10	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	paket	1 Paket	0			1 Paket			
1	01	2.09	11	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	paket	1 Paket	1	1	100	1 Paket			

Kode Rekening				Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rencana PD Tahun Berjalan)	Praliran Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	2.02	10	(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gigitan, Gigitan Serangga, dan Gigitan Hewan Lain	(3) Terselenggaranya upaya pencegahan penyakit muskular, tidak tidak dimulai pelayanan kesehatan Orang dengan Gigitan Serangga	orang	65	60	75	60	75	(11) = 668*10	(12) = (11/5) x 100	
1	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terhadap Tuberkulosis	Persentase orang dengan tuberkulosis yang terdiagnosa dan terobati	orang	86	0	50	86	50			
1	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang teridentifikasi dan mendapat layanan konseling	orang	86	0	60	86	60			
1	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	100	100	100	100	100			
1	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Bioterror	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	100	100	100	100	100			
1	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	85	0	80	85	80			
1	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	85	0	80	85	80			
1	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	85	0	80	85	80			
1	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	85	80	80	85	80			
1	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	95	92	92	100	92			
1	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	75	71	71	70	75			
1	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	84	80	80	100	84			
1	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	84	0	80	63	84			
1	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	804	70	80	88	804			
1	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	231/100.000	207	231/100.000	0	231/100.000			
1	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	8	8,90%	8,90%	0	8			
1	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	307244	89318	307244	100	307244			
1	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase penduduk yang teridentifikasi dan mendapat layanan kesehatan	orang	1 paket	0	1 paket	100	1 paket			

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (t-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	1.02	02	2.02	33	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8x10	(12) = (11/5) x 100
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas	31	31	31	31	100	31		
						Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan manajemen Puskesmas sesuai standar	Puskesmas	31	31	31	100	100	31		
						Jumlah dana operasional 2 Puskesmas/bawat Inap; Tersedianya dana operasional 1 Puskesmas Rawat Jalan;	Puskesmas	100	100	100	100	100	100		
						- Tersedianya dana operasional 50 Pustu	Puskesmas	100	100	100	100	100	100		
						- Tersedianya data keuangan BLUD	persen	85	85	85	85	100	85		
						Ketelohan siaga aktif (pemeriksaan dan pakekkel) aktif	Puskesmas	8	8	8	8	100	8		
						Terlaksananya re-akreditasi	Puskesmas	85	85	85	85	76	85		
						terlaksananya pelaksanaan kewaspahitan dini dan asesmen wilayah	persen	84	80	80	80	63	84		
						tersedianya layanan kesehatan urut/IKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	persen	80	75	75	75	0	80		
						Perencanaan Puskesmas yang telah melaksanakan penyusunan perencanaan	persen	100	100	100	100	50	100		
						Insentif Puskesmas yang aktif	persen	60	60	60	60	85	83		
						Perencanaan Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan secara terapan dan akreditasi dan berdaya cewa	persen	62	59	59	59	68	62		
						Perencanaan Puskesmas dengan 9 Jenis angka kesihatan sesuai standar	persen	84	80	80	80	100	84		
						Perencanaan SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKN dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	100	100	100		
						Tersedianya data laporan keuangan BLUD Puskesmas	persen	84	80	80	80	81	84		
						Perencanaan SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKN dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	100	80	100		
						Meningkatnya kualitas dan kesempatan waktu dalam penyampaian layanan, bimbingan kesehatan dan projiy SDM Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1	1		
						Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	100	70 orang		
						Perencanaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Peryyaratan Perizinan	persen	62	62	62	62	62	62		
						Perencanaan sarana pelayanan Kefarmasian sesuai dengan standar	persen	96	80	80	92	87	96		
						Perencanaan sarana pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	persen	200	200	200	200	81	200		
						Pembelian Iktin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen	42	42	42	42	100	42		

Urusan	Bidang Urusan	Rode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
		Program	Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Rencana PD Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1.02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(3) Persentase Melaksanakan monitoring, pemberian dan pemeriksaan serta pelayan kefarmasian Terlibatannya pengabdian obat puskertesa dan stem E-Lajitak di instalasi farmasi kearsitektur klinik kecantikan dari salon kecantikan Terlibatannya penyuluhan keamanan pangan dan gizi kepada sekolah - terbitanya pedoman pelayanan	persen	84	80	80	65	81	84	100
1.02	04	2.03		Penerbitan sertifikat produk pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	persen	80	80	70	88	80	80	100
1.02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persentase Terlibatannya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	persen	100	80	80	80	80	100	100
1.02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase terlibatannya industri rumah tangga sesuai standar	persen	100	0	75	75	100	100	100
1.02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persentase Terlibatannya Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	persen	80	0	75	75	100	100	100
1.02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat ber-PHBS	persen	80	50	70	50	71	80	80
1.02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kamitran, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlibatannya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kamitran, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	800	50	70	50	71	800	800
1.02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Terlibatannya media penyuluhan dan seran pelayanan kesehatan	persen	80	50	70	50	71	80	80
1.02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi/Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlibatannya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	84	45	60	60	75	84	84
1.02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase terlibatannya promosi kesehatan melalui berbagai media promosi	persen	75	45	50	50	71	75	75
1.02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlibatannya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	persen	84	0	80	50	63	84	84
1.02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase terlibatannya monitoring dalam upaya pemberdayaan masyarakat	persen	75	0	70	50	71	75	75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Realisasi Anggaran per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 November 2022 pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

1. RINGKASAN REALISASI TAPKIN DAN PENDANAAN

Berikut ditampilkan tabel realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Bulan November)

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG SAMPAI DENGAN NOPEMBER TAHUN 2022

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	BELANJA DAERAH	322.948.660.177,00	210.950.106.102	65,32%	70%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.459.565.642,00	94.963.446.290,00	88,37%	90%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	16.486.420,00	82,43%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	16.486.420,00	82,43%	100%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.229.592.969,00	74.432.787.210,00	91,63%	95%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.013.592.969,00	74.270.289.210,00	91,68%	95%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	216.000.000,00	162.498.000,00	75,23%	85%
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.560.763,00	168.241.895,00	83,06%	90%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	20.000.000,00	16.440.000,00	82,20%	90%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	39.370.000,00	78,74%	85%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.060.763,00	11.966.000,00	99,21%	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	25.367.500,00	84,56%	90%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	39.340.300,00	78,68%	85%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	7.500.000,00	5.625.000,00	75,00%	85%
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	5.145.000,00	64,31%	75%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	24.988.095,00	99,95%	100%
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.503.750.000,00	20.059.718.333,00	78,65%	80%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	125.882.333,00	69,93%	80%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.323.750.000,00	19.933.836.000,00	78,72%	85%
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.661.910,00	286.212.432,00	56,83%	70%

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.992.000,00	27.078.600,00	62,99%	75%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.669.910,00	249.158.832,00	55,29%	70%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.975.000,00	99,75%	100%
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	213.161.759.960,00	114.625.499.237,36	53,77%	65%
II.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah	14.653.242.535,00	3.723.946.135,00	25,41%	35%
1	Pembangunan Puskesmas	2.008.389.065,00	2.008.389.065,00	100,00%	100%
2	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas	2.271.339.730,00	118.731.330,00	5,23%	85%
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	74.615.000,00	74.615.000,00	100,00%	100%
4	Pengadaan Obat Vaksin	6.251.902.889,00	1.522.210.740	24,35%	90%
5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.046.995.851,00	-	0,00%	90%
II.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	198.498.517.425,00	110.893.348.702,36	55,87%	75%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.095.000,00	61.568.600,00	99,15%	100%
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	91.139.000,00	-	0,00%	25%
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	20.200.000,00	-	0,00%	25%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.750.000,00	10.050.000,00	28,11%	40%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	20.000.000,00	-	0,00%	25%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.100.000,00	28.692.000,00	98,60%	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.138.000,00	44.157.000,00	97,83%	100%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.865.000,00	22.365.000,00	97,81%	100%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus	20.000.000,00	19.952.000	99,76%	100%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	25.000.000,00	0	0,00%	25%
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000,00	23.856.000,00	79,52%	15%
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	32.775.000,00	31.878.000,00	97,26%	100%
12	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	87.710.500,00	86.767.450,00	98,92%	100%
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	13.033.394.900,00	6.894.365.600,00	52,90%	70%
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.036.517.000,00	2.616.911.400,00	86,18%	100%
15	Pengelolaan Pelayanan	148.971.100,00	141.749.600,00	95,15%	100%

	Kesehatan Lingkungan				
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	210.118.000,00	207.769.000,00	98,88%	100%
17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.000.000,00	29.904.000,00	99,68%	100%
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	35.000.000,00	33.004.000,00	96,87%	100%
19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.000.000,00	28.558.400,00	95,19%	100%
20	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	79.991.087.325,00	61.525.209.925,00	76,92%	85%
21	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan	240.409.600,00			
22	Operasional Pelayanan Puskesmas	88.083.186.000,00	34.396.212.127,36	39,05%	75%
23	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.138.061.000,00	4.689.478.600,00	35,69%	45%
II.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	10.000.000,00	8.204.400,00	82,04%	50%
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000,00	8.204.400,00	82,04%	100%
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.156.300.000,00	506.300.000,00		
III.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusi Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	350.000.000,00	35,00%	50%
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.000.000.000,00	350.000.000,00	35,00%	50%
III.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	156.300.000,00	156.300.000,00	100,00%	100%
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000,00	156.300.000,00	100,00%	100%
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	321.839.975,00	183.207.975,00	56,93%	65%
IV.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975,00	25.363.975,00	100,00%	100%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975,00	25.363.975,00	100,00%	100%
IV.2	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	156.740.000,00	91.660.000,00	58,48%	50%

1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	156.740.000,00	91.660.000,00	58,48%	65%
IV.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	139.736.000,00	66.184.000,00	47,36%	55%
1	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	139.736.000,00	66.184.000,00	47,36%	55%
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	849.194.600,00	671.652.600,00	79,09%	85%
V.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508.834.000,00	343.062.400,00	67,42%	80%
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	508.834.000,00	343.062.400,00	67,42%	80%
V.2	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kabupaten/kota	340.360.600,00	328.590.200,00	96,54%	100%
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat	340.360.600,00	328.590.200,00	96,54%	100%
	JUMLAH	322.948.660.177,00	210.950.106.102,36	65,32%	80%

2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tabel 3.4 realisasi anggaran Dinas kesehatan Tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022, meskipun dalam kondisi pandemi covid- 19 yang membatasi aktifitas secara tatap muka/pertemuan langsung, pelayanan kesehatan masih dapat mencapai hasil meskipun belum maksimal.

Dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.948.660.177,00 dengan realisasi sampai dengan Bulan November sebesar Rp. 210.950.106.102,36 (65,32%). Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 15 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Program Penunjang Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 16 sub kegiatan merupakan program pendukung bagi terselenggaranya tupoksi Dinas Kesehatan yang bersifat rutin dilaksanakan.

3. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022 (NOVEMBER 2022)

Adapun capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2022 Sampai dengan Bulan November 2022 dapat dijelaskan pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022

CAPAIAN SPM TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam persen	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	19.592	100	17.140	87,48
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	18.702	100	16.466	88,04
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	17.811	100	16.521	92,76
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.512	100	77.429	89,50
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	155.442	100	151.201	97,27
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	754.465	100	591.501	78,40
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	92.994	100	83.922	90,24
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200.001	100	197.601	98,80

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam persen	Realisasi	Capaian
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.644	100	18.644	100,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.882	100	1.764	93,75
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	23.474	100	28.490	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	28.060	100	22.479	80,11

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Adapun isu-isu strategis bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) belum sesuai standar
- 2) Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan
- 3) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita
- 4) Penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup cenderung meningkat

- 5) Penempatan tenaga kesehatan (perawat dan dokter) di sarana pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas belum merata
- 6) Penyediaan pembiayaan kesehatan

2.4 Review terhadap rancangan awal OPD

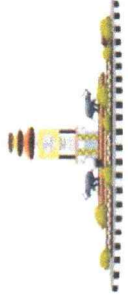
Review terhadap rancangan awal OPD dapat dilihat pada tabel T-C. 31 sebagai berikut :

TABEL T-C. 31

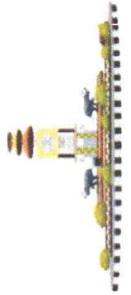
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024

OPD : Dinas Kesehatan

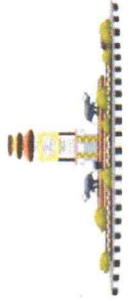
URUSAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	98,00 Person	166.492.518.822	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	98 Person	166.492.518.822	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100,00 Person	25.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100,00 Person	25.000.000,00	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B.Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan)	25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B.Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan)	25.000.000,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100,00 Person	77.754.723.222,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100,00 Person	77.754.723.222,00	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	B.Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.194 Orang/Bulan	77.538.723.222	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	B.Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.194 Orang/Bulan	77.538.723.222	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	B.Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	216.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	B.Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	216.000.000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00 Person	50.000.000,00	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00 Person	50.000.000,00	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	B.Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	B.Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10,00 Orang	50.000.000,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	100,00 Person	252.560.763,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	B.Lampung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	100,00 Person	252.560.763,00	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B.Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B.Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	



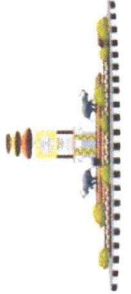
URUSAN	BIDANG	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	02	01	2.06	02	1	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	B.Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.000.000
1	02	01	2.06	03	1	12.060.763	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	B.Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.060.763	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.060.763
1	02	01	2.06	04	1	30.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	B.Lampung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.000.000
1	02	01	2.06	05	1	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	B.Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000
1	02	01	2.06	06	10	7.500.000	Penyediaan Bahan Peraturan/Perundang-undangan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Eceaan dan Peraturan/Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	7.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Eceaan dan Peraturan/Perundang-undangan yang Disediakan	7.500.000
1	02	01	2.06	08	12	8.000.000	Fasilitas kunjungan tamu	B.Lampung	Jumlah Laporan Fasilitas KunjunganTamu	12 Laporan	8.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000
1	02	01	2.06	09	12	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	B.Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000
1	02	01	2.07		100,00	848.018.926,73	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100,00 Person	848.018.926,73	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	848.018.926,73
1	02	01	2.07	01	1	450.000.000	Pengadaa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	B.Lampung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	450.000.000
1	02	01	2.07	02	1	220.000.000	Pengadaa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	220.000.000



URUSAN	URUSAN	URUSAN/PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	02	01	2.07	05	1	100.000.000	Pengadaan Mebel	Elampung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	B.Lampung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	100.000.000
1	02	01	2.08	06	1	78.018.927	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Elampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	78.018.927	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	78.018.927
1	02	01	2.08	01	100,00	20.169.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Elampung	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100,00 Persen	20.169.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Elampung	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100,00 Persen	20.169.500.000,00
1	02	01	2.08	02	1	170.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Elampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Elampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000
1	02	01	2.08	04	1	19.999.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Elampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.999.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Elampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.999.500.000
1	02	01	2.09	01	100	698.869.910,00	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Elampung	Inventaris Kantor yang Terpelihara	100 Persen	698.869.910,00	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Elampung	Inventaris Kantor yang Terpelihara	100,00 Persen	698.869.910,00
1	02	01	2.09	01	1	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Elampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Elampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000
1	02	01	2.09	02	8 unit mobil, 38 unit motor	455.869.910	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Elampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit mobil, 38 unit motor	455.869.910	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Elampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit mobil	455.869.910



URUSAN	BIDANG	URUSAN	BIDANG	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
																								KODE REKENING
1	02	01	2.09	06	B.Lampung	Jumlah Pesalatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000											10.000.000
1	02	01	2.09	09	B.Lampung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	B.Lampung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000											150.000.000
1	02	01	2.09	11	B.Lampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	B.Lampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000											50.000.000
1	02	01	2.10			Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31 Unit	66.696.846.000,00	Peningkatan pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31,00 Unit	66.696.846.000,00											66.696.846.000,00
1	02	01	2.10	01	B.Lampung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31 Unit	66.696.846.000	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	B.Lampung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31 Unit	66.696.846.000											66.696.846.000
1	02	02		02		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	2 Angka	88.369.448.778,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Unsur		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	2,00 Angka	88.369.448.778,00											88.369.448.778,00
						Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	10 Kasus				Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	10,00 Kasus												
						Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (sawah Dua Tahun)	6,30 Persen				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (sawah Dua Tahun)	6,30 Persen												
						Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	364 Kasus				Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	364,00 Kasus												



URUSAN	BIDANG	URUSAN/PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	02	02	2.01	02	02	138833.613.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	138833.613.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	138833.613.000,00					
1	02	02	2.01	02	02	6.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	B.Lampung	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun	1	6.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	B.Lampung	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun	1	6.000.000.000					
1	02	02	2.01	13	02	150.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Disediakan	1	150.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	150.000.000					
1	02	02	2.01	14	02	3.500.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Disediakan	1	3.500.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	3.500.000.000					
1	02	02	2.01	16	02	3.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	B.Lampung	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	3.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	B.Lampung	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	3.000.000.000					
1	02	02	2.01	17	02	1.000.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	B.Lampung	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	1.000.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	B.Lampung	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	1.000.000.000					
1	02	02	2.01	20	02	183.613.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpilih/arsesuai standar	B.Lampung	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpilih/arsesuai standar	1	183.613.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpilih/arsesuai standar	B.Lampung	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpilih/arsesuai standar	1	183.613.000					
1	02	02	2.02	02	02	74.385.835.778,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	74.385.835.778,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	74.385.835.778,00					



URUSAN	URUSAN	URUSAN	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	B.Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19592	Orang	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	B.Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.592	Orang	500.000.000						
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	B.Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18702	Orang	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	B.Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.702	Orang	300.000.000						
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	B.Lampung	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.811	Orang	250.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	B.Lampung	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.811	Orang	250.000.000						
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	B.Lampung	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	86.512	Orang	250.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	B.Lampung	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86.512	Orang	250.000.000						
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	B.Lampung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	155442	Orang	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	B.Lampung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155.442	Orang	300.000.000						
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	B.Lampung	Jumlah Periduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754465	Orang	350.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	B.Lampung	Jumlah Periduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754.465	Orang	350.000.000						
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	B.Lampung	Jumlah Periduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92994	Orang	250.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	B.Lampung	Jumlah Periduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92.994	Orang	250.000.000						



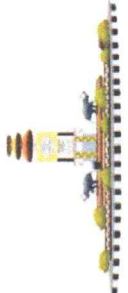
URUSAN	BIDANG	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
																											KODE REKENING	
1	02	02	02	02	08	200001	Orang	300.000.000	Orang	200001	Orang	300.000.000	E.Lampung	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001	Orang	300.000.000	E.Lampung	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001	Orang	300.000.000	E.Lampung	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001	Orang	300.000.000	
1	02	02	02	09	18644	Orang	300.000.000	Orang	18644	Orang	300.000.000	E.Lampung	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18644	Orang	300.000.000	E.Lampung	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.644	Orang	18.644	Orang	300.000.000	E.Lampung	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.644	Orang	300.000.000
1	02	02	02	10	1882	Orang	250.000.000	Orang	1882	Orang	250.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1882	Orang	250.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.882	Orang	1.882	Orang	250.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.882	Orang	250.000.000
1	02	02	02	11	23474	Orang	500.000.000	Orang	23474	Orang	500.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23474	Orang	500.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23.474	Orang	23.474	Orang	500.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23.474	Orang	500.000.000
1	02	02	02	12	28060	Orang	300.000.000	Orang	28060	Orang	300.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang Terduga HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28060	Orang	300.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28.060	Orang	28.060	Orang	300.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28.060	Orang	300.000.000
1	02	02	02	14	1	Dokumen	750.000.000	Dokumen	1	Dokumen	750.000.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	750.000.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	1	Dokumen	750.000.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	750.000.000



URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	KODE REKENING
1	02	02	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000	
1	02	02	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	200.000.000	
1	02	02	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	200.000.000	
1	02	02	02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000	
1	02	02	02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000	
1	02	02	02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	B.Lampung	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851 Orang	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	B.Lampung	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851 Orang	200.000.000	



URUSAN	BIDANG	URUSAN/PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
																							KODE REKENING
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	B.Lampung	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851 Orang	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	B.Lampung	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851 Orang	200.000.000	B.Lampung	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851 Orang	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	B.Lampung	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851 Orang	200.000.000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	200.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	200.000.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	200.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	200.000.000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.369.821.778	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.369.821.778	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.369.821.778	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.369.821.778
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	200.000.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	200.000.000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	18.242.514.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	18.242.514.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	18.242.514.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	18.242.514.000
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	14.573.500.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	14.573.500.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	14.573.500.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	B.Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	14.573.500.000
1	02	02	2.02	35	Peleaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	B.Lampung	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	1.150.000.000	Peleaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	B.Lampung	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	1.150.000.000	B.Lampung	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	1.150.000.000	Peleaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	B.Lampung	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	1.150.000.000
1	02	02	2.02	37	Peleaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	300.000.000	Peleaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	300.000.000	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	300.000.000	Peleaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	300.000.000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	B.Lampung	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 orang	250.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	B.Lampung	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 orang	250.000.000	B.Lampung	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 orang	250.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	B.Lampung	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 orang	250.000.000



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	B.Lampung	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 orang	250.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	B.Lampung	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 orang	250.000.000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	B.Lampung	Jumlah Orang menderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 orang	250.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	B.Lampung	Jumlah Orang menderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 orang	250.000.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	80,00 Person	150.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	80,00 Person	150.000.000,00
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	80,00 Person	450.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	80,00 Person	480.000.000,00
							Persentase Pukemas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60,00 Person				Persentase Pukemas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60,00 Person	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00 person	300.000.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00 person	300.000.000,00



URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	02	03	2.02	02	B.Lampung	150.000.000	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	B.Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	150.000.000	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	B.Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	150.000.000
1	02	03	2.02	03	B.Lampung	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	150.000.000
1	02	03	2.03		B.Lampung	180.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah/kota	82 persen	180.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah/kota	82,00 persen	180.000.000,00
1	02	03	2.03	01	B.Lampung	150.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 orang	150.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	B.Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 orang	150.000.000
1	02	04			B.Lampung	500.000.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	B.Lampung	Persentase Sarana Pelayanan sesuai dengan Standar	95,00 Persen	500.000.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	B.Lampung	Persentase Sarana Pelayanan sesuai dengan Standar	95,00 Persen	500.000.000,00
1	02	04	2.01		B.Lampung	180.000.000,00	Pemberian Iain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	B.Lampung	Persentase pengelolaan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	100 persen	180.000.000,00	Pemberian Iain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	B.Lampung	Persentase pengelolaan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	100,00 persen	180.000.000,00
1	02	04	2.01	01	B.Lampung	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	150.000.000



URUSAN	BIDANG	URUSAN/PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	KODE REKENCING				
								URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	04	2.03	01	Penerbitan sertifikat pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80,00 Persen	200.000.000,00	B.Lampung	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dekumen	200.000.000
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market makanan minuman industri Rumah Tangga	100,00 Persen	150.000.000,00	B.Lampung	Pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	100,00 Persen	180.000.000,00
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	50 Unit	150.000.000	B.Lampung	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	150.000.000



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Masyarakat ber PHBS	75,00 Persen	900.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Masyarakat ber PHBS	75,00 Persen	900.000.000,00		
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Komitmen, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Komitmen, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Kabupaten/Kota	74,00 persen	500.000.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Komitmen, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Komitmen, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Kabupaten/Kota	74,00 persen	500.000.000,00		
1	02	05	2.01	01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000		
1	02	05	2.02	Pelekanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif diem peningkatan Informasi sehatan	82,00 persen	280.000.000,00	Pelekanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif diem peningkatan Informasi sehatan	82,00 persen	280.000.000,00		
1	02	05	2.02	01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Bersih dan Sehat	1 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	250.000.000		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelekanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif diem peningkatan Informasi sehatan	82,00 persen	150.000.000,00	Pengembangan dan Pelekanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif diem peningkatan Informasi sehatan	82,00 persen	150.000.000,00		
1	02	05	2.03	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	150.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	B.Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	150.000.000		



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan di Kota Banda Lampung yaitu masih ada program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja OPD sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan mekanisme bottom up melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten) akan diperoleh daftar usulan program/kegiatan bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usulan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hasil musrenbang tingkat kecamatan diakomodir dalam rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Perencanaan kegiatan dari hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang mencakup peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan tujuan yang bermutu; peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan sanitasi; peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Adapun usulan rencana yang dapat menunjang isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu antara lain :

1. Pelatihan kader PHBS, kelompok pemakai sarana sanitasi.
2. Penyuluhan pada kelompok masyarakat meliputi bidang kesehatan lingkungan, PHBS, perbaikan gizi termasuk pemberian makanan pendamping ASI dan penanganan balita gizi buruk, pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
3. Pembinaan dan pengembangan posyandu, posbindu, Poskeskeskel keluarahan siaga termasuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu dalam upaya meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan pengangraan bidang kesehatan dalam rangka penjaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat.
5. Lokakarya mini di tingkat puskesmas baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang rutin dilaksanakan (bulanan, triwulan). Usulan Program dan kegiatan yang melalui mekanisme Musrenbang sebagai salah satu pemangku kepentingan pada Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan Untuk mendukung Kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadiresponsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Dengan adanya Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, maka diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Guna menyelaraskan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maupun pembangunan antara daerah tersebut, maka salah satunya dilakukan melalui penyusunan Renja OPD. Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.2.1. VISI

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang, maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD tahap ke 4. Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG:Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT:Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS:adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN:adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA:Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN:Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakatkota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL:Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING :Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK:Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan

KEMAKMURAN:yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

3.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan

diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada

akhirnya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA: Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka melayani kebutuhan distribusi perekonomian dan pengembangan investasi serta kebutuhan sosial masyarakat.

MISI KEEMPAT: Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI KELIMA: Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius, berbasis keluarga dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional..

MISI KEENAM: Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka

menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan yang didukung oleh tingkat keamanan kota terpadu dengan melibatkan kerjasama antara aparaturnya keamanan serta partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung. Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Periode 2021-2026

Visi		Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.								
Misi 1		: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Mengoptimalkan upaya pelayanan gizi dan kesehatan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan mengurangi prevalensi kekurangan gizi pada balita	2. Meningkatkan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi, kunjungan ibu hamil dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu	3. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas				
2.		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengoptimalkan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar	4. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah						
3.		Meningkatnya pamaratan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas baik sarana prasarana maupun pelayanan kesehatan. 2. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang meliputi pembiayaan, sumber daya manusia dan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar melalui akreditasi Puskesmas, 6. Pengembangan guideline pelayanan kesehatan, termasuk Pengembangan profesionalitas SDM kesehatan baik medis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi 7. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 8. Menjamin keamanan. Khasiat, kemanfaatan dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan 9. Pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional						

Visi		Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.							
Misi 1		: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat							
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			2. Meningkatkan peran petugas kesehatan dalam upaya promosi kesehatan	11. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program termasuk lembaga swasta untuk melakukan kampanye kesehatan.					

3.3. Program dan Kegiatan

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan tersebut dijabarkan dalam sasaran pelaksanaan program-program bidang kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.1 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	94,2	100	100	100	100	100	100	100
	2 Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	95,64	100	100	100	100	100	100	100
	3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	94,71	100	100	100	100	100	100	100
	4 Pelayanan Kesehatan Balita	%	87,51	100	100	100	100	100	100	100
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	85,76	100	100	100	100	100	100	100
	6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	46,72	100	100	100	100	100	100	100
	7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	%	83,30	100	100	100	100	100	100	100
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	47,81	100	100	100	100	100	100	100
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	98,79	100	100	100	100	100	100	100
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	71,00	100	100	100	100	100	100	100
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	55,60	100	100	100	100	100	100	100
	12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	80,74	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	13 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	kasus	10	10	10	10	10	10	10	
	14 Insidensi TB per 100.000 penduduk	angka	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	
	15 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
	16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	59,00	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00	
1.1.3 Meningkatkan Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	17 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	8,90	8,90	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	18 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	49,00	49,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00	

Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KODE BERENCANA	URUSAN/ SIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET JAHIR RPJMD/ RE-NITRA	REALISASI CAPAIAN RPDP TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN RPDP TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SARAFAN	PERURAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PEMANGKAT DAERAH PERTANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	BUMBER DANA		PRIORITAS	TARGET	
1 02 01	DINAS KESEHATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administratif/Umum	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	Person	98,00	98,00	98,00	284.211.987.899,73	166.492.811.822	Memperkuat Stabilitas Pelayanan dan Transformasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	266.005.174.979,47	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkelanjutan	Person	100,00	100,00	100,00	26.000.000,00				100,00	26.200.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 01	Persyaratan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10 Dokumentasi (5 Dokumentasi Revisi dan 5 Dokumentasi Perubahan Revisi)	2 Dokumentasi (1 Dokumentasi Revisi dan 1 Dokumentasi Perubahan Revisi)	2 Dokumentasi (1 Dokumentasi Revisi dan 1 Dokumentasi Perubahan Revisi)	20.000.000,00	APBD		Dinas Kesehatan	2 Dokumentasi (1 Dokumentasi Revisi dan 1 Dokumentasi Perubahan Revisi)	26.200.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pemenuhan Dokumen Keuangan (Keuangan APBD yang Akutabel)	Person	100,00	100,00	100,00	77.754.793.232,00				100,00	81.642.487.383,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 01	Persyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.194	1.194	1.194	77.538.720.222				1.194	81.418.609.383,00	
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Pemertanggungjawaban dan Penugasan/Verifikasi Keuangan APBD	Jumlah Dokumen Pemertanggungjawaban dan Penugasan/Verifikasi Keuangan APBD	Dokumen	3	1	1	216.000.000				1	228.800.000,00	
1 02 01 2.05	Administratif Pengawasan Perangkat Daerah	Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Sambutan Dinas Akutabel	Person	100,00	100,00	100,00	80.000.000,00				100,00	82.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 09	Perakibahan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pangkat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pangkat yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	10	10	50.000.000,00	APBD			10	52.500.000,00	
1 02 01 2.06	Administratif Umum Perangkat Daerah	Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Dinas Operasional OPS	Person	98,00	98,00	98,00	262.840.769,00				100,00	248.188.801,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Inventaris Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Inventaris Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	20.000.000	APBD		Dinas Kesehatan	1	21.000.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	30.000.000	APBD		Dinas Kesehatan	1	32.000.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	12.000.763	APBD		Dinas Kesehatan	1	12.663.801,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan bahan bakar kantor	Jumlah Paket Bahan Bakar Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	30.000.000				1	31.500.000,00	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	30.000.000	APBD		Dinas Kesehatan	1	32.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bicara dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1	1	7.500.000				10	7.875.000,00	

URSAH	KODE PERENCANAAN	URUMAH/ BIDANG URUMAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA/ RENCANA/ RENCANA	REALISASI PERIODE RENCANA/ RENCANA/ RENCANA	PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK BARAJAN	PERKIRAAN MAJU BERKALA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGKAT PANGKAS JAWAB		
								TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	BUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
												NASIONAL	DAERAH			
1 02 01 2.06 08	08	Fransiska Kuyubangan Temu	Jumlah Laporan Pembiayaan/Suplemen Temu	Laporan	5	1	1	8.000.000				6.400.000,00				
1 02 01 2.06 09	09	Penyabangan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Laporan	3	1	1	75.000.000				76.750.000,00				
1 02 01 2.07	07	Pengajuan Biaya Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris	Persen	98,00	98,00	98,00	848.018.924,73				856,0 18,873	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.07 01	01	Pengajuan Kebutuhan Perorangan Dinas dan Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kebutuhan Perorangan Dinas dan Kebutuhan Dinas Jabatan yang Diperoleh	Unit	1	1	1	450.000.000	APBD			450.000.000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.07 02	02	Pengajuan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kebutuhan Jasa Operasional atau Lapangan yang Diperoleh	Unit	3	3	3	220.000.000	APBD			250.000.000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.07 05	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diperoleh	Unit	5	1	1	100.000.000	APBD			100.000.000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.08 05	05	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	Unit	4	1	1	76.018.927	APBD			81.919,973	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	20.149.500.000,00				21.177,978,000,00	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kebutuhan Jaga dan Listrik yang Diperoleh	Laporan	3	1	1	170.000.000				178.500.000				
1 02 01 2.08 04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Diperoleh	Laporan	3	1	1	19.999.500.000				20.999.473,000				
1 02 01 2.09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Diperoleh	Persen	98,00	98,00	98,00	688.869.910,00				785,183,406	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kebutuhan Perorangan Dinas dan Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Perorangan Dinas dan Kebutuhan Dinas Jabatan yang Diperoleh	Unit	1	1	1	30.000.000	APBD			31.300.000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperoleh dan dibayarkan Pajak dan Penunjang yang Diperoleh	Unit	8 unit mobil, 38 unit motor	8 unit mobil, 38 unit motor	8 unit mobil, 38 unit motor	452.869.910	APBD			476.663.406	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 06	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	Unit	3	1	1	10.000.000	APBD			10.300.000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperoleh/Rehabilitasi	Unit	5	1	1	150.000.000	APBD			160.000.000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 11	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperoleh/Rehabilitasi	Unit	5	1	1	50.000.000	APBD			52.500.000	Dinas Kesehatan			

URUSAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB MELAKUKAN	SATUAN	TARGET AKHIR TAHUN 2022 RINDU/ RESTRU	REALISASI CAPAIAN RINDU TAHUN 2022	PERRILAIAN CAPAIAN RINDU TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SABARAN	PERUBAHAN MALI BERKAMA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JAWAB		
								TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
												NASIONAL	DAERAH			
1	02	02	2.02	06	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	754.463	754.463	754.463	330.000.000	DAK	754.463	367.300.000			
1	02	02	2.02	07	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	92.994	92.994	92.994	250.000.000	DAK	92.994	262.300.000			
1	02	02	2.02	08	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	200.001	200.001	200.001	300.000.000	DAK	200.001	315.000.000			
1	02	02	2.02	09	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Orang	18.644	18.644	18.644	300.000.000	DAK	18.644	315.000.000			
1	02	02	2.02	10	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.882	1.882	1.882	250.000.000	DAK	1.882	262.300.000			
1	02	02	2.02	11	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terbuang Tuberkulosis	Orang	23.474	23.474	23.474	500.000.000	DAK	23.474	528.000.000			
1	02	02	2.02	12	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Penyakit HIV	Orang	28.060	28.060	28.060	300.000.000	DAK	28.060	315.000.000			
1	02	02	2.02	14	Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Tardampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Insipidensi Bencana	Dokumen	5	5	5	630.000.000	DAK	1	787.300.000			
1	02	02	2.02	15	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gila Masyarakat	Dokumen	5	5	5	500.000.000	DAK	1	628.000.000			
1	02	02	2.02	16	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	5	5	200.000.000	DAK	1	210.000.000			
1	02	02	2.02	17	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	5	5	200.000.000	DAK	1	210.000.000			
1	02	02	2.02	18	Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	5	5	500.000.000	DAK	1	628.000.000			
1	02	02	2.02	20	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	5	5	200.000.000	APBD	1	210.000.000			
1	02	02	2.02	21	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orang	1.851	1.851	1.851	200.000.000	APBD	1.851	210.000.000			

URUMAH	BIDANG URUMAH/PROGRAM/KEGIATAN	URUMAH/ BIDANG URUMAH/PROGRAM/ KEGIATAN/BSB KEGIATAN	INDIKATOR HASIL/KEGIATAN/ BSB KEGIATAN	SATUAN	TARGET ANJUK KAPALAN RUPD TAHUN 2022 RESTRUKTURISASI	REALISASI CAPAIAN RUPD TAHUN 2022	PERENCANAAN CAPAIAN RUPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEANGKA PERFORMAN				PERENCANAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PELANGKAT DARAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DARAH			
1	02	02	2.02.23	Pengaplikasian Pelayanan Kesehatan Oris dan MAZA	Orang	1.851	1.851	200.000.000	A/RD	1.851	210.000.000				
1	02	02	2.02.25	Pelayanan Kesehatan Prayakti Remuler dan Tidak Remuler	Dokumen	5	5	200.000.000	A/RD	1	210.000.000				
1	02	02	2.02.26	Pengaplikasian Jambian Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	5	32.369.831.774	A/RD	1	14.418.313.847				
1	02	02	2.02.29	Penyayenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5	5	200.000.000	A/RD	1	210.000.000				
1	02	02	2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	5	18.242.314.000	A/RD DAN DAK	1	16.154.639.700				
1	02	02	2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5	5	14.573.300.000	A/RD	1	13.023.175.000				
1	02	02	2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	5	5	1.130.000.000	DAK	12	1.207.500.000				
1	02	02	2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	5	5	300.000.000	DAK	1	315.000.000				
1	02	02	2.02.40	Pengaplikasian pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	orang	320	320	250.000.000	DAK	80	262.300.000				
1	02	02	2.02.41	Pengaplikasian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	orang	280	280	250.000.000	DAK	70	262.300.000				
1	02	02	2.02.42	Pengaplikasian pelayanan kesehatan malaria	orang	120	120	200.000.000	DAK	30	262.300.000				

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	URUBAH/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUBAH/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RESTRATA	REALISASI CAPAIAN RUPD TAHUN 2023	PERUBAHAN CAPAIAN RUPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERUBAHAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEKANGGUNG JAWAB
									TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	BUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SARANAN	TARGET	
									NASIONAL	DAERAH					
1 02 04 2 03 01	Pengembangan dan Penguasaan serta Tidak Lajut Pengawasan Berbasis Teknologi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT) Berbasis Zim Produksi Berbasis Peternakan Makhluk Air Tawar yang dapat Diproduksi oleh IRT		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lajut Pengawasan Berbasis Teknologi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT) Berbasis Peternakan Makhluk Air Tawar yang dapat Diproduksi oleh IRT	Dokumen	5	1	1	1	200.000.000,00	DAK			1	210.000.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 04 2 04	Peningkatan dan Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan Peternakan pada Produksi dan Peternakan Makhluk Air Tawar		Persentase terkinennya industri rumah tangga hasil peternakan	Person	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000.000,00	DAK			100	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 04 2 06 01	Penyediaan jasa transfer pada produk makanan Minuman dan minuman lainnya yang beredar dan pengamatan serta tidak lajut pengamatan		Jumlah Tidak dan Secara Prochekt Monev dan Monev yang dilakukan Tim yang beranggotakan Peternakan dan Lintas Sektor dalam rangka Tidak Lajut Pengawasan	Unit	100	100	100	84	150.000.000,00	DAK			50	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 06	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Masyarakat ter PHBS	Person	80,00	75,00	75,00	75,00	900.000.000,00	APBD			78	948.000.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 06 2 01	Advokasi, Pemberdayaan, Komunitas, Pengetahuan Peningkatan dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terkinennya upaya pemberdayaan, komunitas, pengetahuan, peningkatan pnsa serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	person	80,00	72,00	74,00	74,00	500.000.000,00	APBD			74	528.000.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 03 2 01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5	1	1	1	500.000.000,00	APBD			1	528.000.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 06 2 02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terkinennya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	person	84,00	80,00	82,00	82,00	250.000.000,00	DAK			82,00	262.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 03 2 02 01	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	Dokumen	5	1	1	1	250.000.000,00	DAK			1	262.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 06 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Promotif dan Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terkinennya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	person	84,00	82,00	82,00	82,00	150.000.000,00	DAK			82,00	157.500.000,00	Dinas Kesehatan
1 02 03 2 03 01	Berbagai Tindakan dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Tindakan dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	1	1	1	150.000.000,00	DAK			1	157.500.000,00	Dinas Kesehatan

BAB V PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun psesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal (Ranwal) Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA